



STRATEGI PENINGKATAN RESILIENSI INDUSTRI PADAT KARYA DI TAHUN 2025

Aditya Eka Pranandiansyah* & Lisnawati**

Abstrak

Kondisi industri padat karya di Indonesia sedang menghadapi tantangan besar untuk bertahan, setelah sebelumnya dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Industri ini menghadapi persaingan global yang ketat, perubahan permintaan pasar yang cepat, dan meningkatnya biaya operasional dan produksi. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang perlunya industri padat karya untuk meningkatkan resiliensi dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan di tahun 2025 ini. Komisi VII DPR RI melalui fungsi legislasi dan pengawasannya perlu mendorong kerja sama antar-kementerian/lembaga yang terkait dengan industri padat karya, agar kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran, dan menciptakan strategi untuk meningkatkan kemampuan SDM dan keterampilan pekerja dalam industri padat karya. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong revisi UU Perindustrian yang dapat memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Pendahuluan

Kondisi industri padat karya khususnya di Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan besar untuk bertahan. Sebelumnya, PT Sritex mengumumkan pailit di tahun 2024, yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja pada 20 ribu orang karyawan. Angka *Purchasing Manager's Index* Indonesia juga mengalami penurunan angka ke bawah 50 poin sejak April 2024 yang menandakan bahwa kinerja industri padat karya ini sedang tidak baik (Wuryandari & Zanggi, 2024). Menurut data dari S&P Global, di tahun 2024 terdapat pelemahan penjualan (Business Indonesia, 2025), terutama oleh masuknya barang impor murah dalam jumlah besar, sehingga hasil produksi industri dalam negeri tidak dapat terserap di pasar domestik.

Saat ini, stimulus yang telah diberikan oleh pemerintah untuk industri padat karya adalah peluncuran skema kredit/pembiayaan baru bernama skema kredit investasi padat karya yang dirancang khusus untuk mendukung revitalisasi mesin dan peningkatan produktivitas di sektor industri padat karya. Skema kredit ini ditujukan pada sektor industri seperti pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit, barang dari kulit, alas kaki, mainan anak, serta makanan dan minuman (Limanseto, 2024). Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk merealisasikan skema kredit investasi padat karya ini. Kendati demikian, masih banyak

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: aditya.pranandiansya@dpr.go.id

***) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: lisnawati@dpr.go.id

tantangan lain di sektor industri padat karya selain pembiayaan. Tulisan ini membahas tantangan utama yang dihadapi industri padat karya serta langkah-langkah untuk meningkatkan resiliensi-nya.

Tantangan Utama Industri Padat Karya

Secara umum, ada dua jenis tantangan yang dihadapi oleh industri padat karya di tahun 2025 ini. Tantangan pertama yang dihadapi industri padat karya ada pada sisi eksternal, yaitu pada keseimbangan neraca ekspor impor. Industri padat karya relatif sensitif dengan keadaan perdagangan internasional, contohnya harga bahan baku yang fluktuatif. Saat ini, banyak industri yang mengandalkan bahan baku diimpor, karena bahan baku lokal sering kali tidak memadai dari segi ketersediaan maupun kualitas. Ketergantungan impor bahan baku ini akan meningkatkan biaya produksi dan meningkatkan risiko fluktuasi harga. Hal ini menyebabkan harga pokok produksi dari industri padat karya menjadi tinggi dan tidak mampu bersaing dengan harga barang jadi yang berasal dari luar negeri. Dari sisi ekspor, nilai tarif cukai ekspor dari negara mitra dagang juga akan berpengaruh terhadap jumlah ekspor Indonesia (Pangestu, 2024).

Faktor lain yang mempengaruhi harga pokok produksi industri padat karya adalah harga minyak mentah dunia. Pada Januari 2025, harga minyak mentah mencapai US\$76,81 per barel, naik US\$5,20 dibanding bulan Desember 2024 (Kementerian ESDM, 2025). Harga minyak mentah yang tinggi akan berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan baku industri, misalnya pada industri petrokimia yang menggunakan minyak mentah sebagai bahan baku utama.

Tantangan berikutnya adalah dari sisi internal, yaitu melemahnya daya beli masyarakat terhadap hasil produksi industri padat karya. Faktor deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut sejak Mei-September 2024 menjadi penyebab utama penurunan daya beli masyarakat yang berlanjut hingga akhir tahun 2024 (Bolivia, 2024). Faktor-faktor makroekonomi lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun, angka pendapatan masyarakat yang masih timpang, dan tingginya tingkat pengangguran juga mempengaruhi lemahnya daya beli masyarakat.

Tantangan lainnya datang dari kinerja industri padat karya yang dipengaruhi oleh tingkat produktivitas. Tingkat produktivitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor keterampilan SDM, faktor teknologi dan peralatan produksi, faktor manajemen dan organisasi, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan kerja dan motivasi (Lestari, 2017). Peningkatan produktivitas ini menjadi penting karena produktivitas industri yang tinggi akan berimplikasi pada peningkatan daya saing industri di kancah internasional.

Peningkatan Resiliensi Industri Padat Karya

Untuk dapat meningkatkan resiliensi industri padat karya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, hal penting yang perlu dilakukan pemerintah adalah evaluasi terhadap kondisi industri padat karya di Indonesia dibandingkan negara pesaing. Tidak semua industri dapat didorong, karena kebijakan untuk satu sektor industri pastinya akan memberikan efek domino ke industri lainnya, baik secara langsung (*supply chain*) maupun tidak langsung (kondisi makroekonomi). Oleh karena itu, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor, baik dari faktor suku bunga domestik maupun internasional, upah minimum regional, kualitas sumber daya manusia (SDM), maupun *market access*.

Hilirisasi bahan baku juga menjadi penting bagi industri padat karya. Dengan hilirisasi bahan baku, baik jumlah maupun kualitas bahan baku lokal akan meningkat, sehingga pelaku industri padat karya dapat memenuhi kebutuhan produksinya dengan bahan baku dalam negeri. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan impor bahan baku, yang akan berimplikasi pada peningkatan daya saing produk industri padat karya. Hilirisasi industri ini juga akan menyerap tenaga kerja lebih banyak, sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Pada dasarnya, industri padat karya sangat dipengaruhi dengan produk domestik bruto (PDB), yang menjadi indikator utama daya beli masyarakat. Terkait dengan keadaan ini, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian. *Pertama*, terkait dengan peningkatan kualitas produk di sektor padat karya. Peningkatan kualitas produk akan mempengaruhi daya saing produk industri padat karya di pasar global, yang nantinya akan meningkatkan nilai ekspor. Dalam hal ini, pemerintah perlu mendorong industri untuk meningkatkan inovasi dan memperbanyak wadah dalam melakukan transfer pengetahuan, baik melalui pelatihan dan pengembangan, *knowledge sharing*, *workshop*, maupun kolaborasi dengan lembaga pendidikan.

Kedua, pengembangan pasar ekspor internasional dan penyerapan produk di pasar domestik harus ditingkatkan. Pengembangan pasar dalam negeri harus diimbangi dengan pengembangan pasar ekspor. Dalam hal ini, pemerintah harus menjembatani kerja sama internasional yang dapat meningkatkan akses ke teknologi, potensi pasar, dan sumber daya lainnya.

Ketiga, bila memang industri padat karya mengalami *sunset* atau kontraksi karena perubahan struktur ekonomi, pemerintah sebaiknya fokus membantu pekerja dan pemilik industri untuk melakukan transisi usaha. Dalam hal ini, pemanfaatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi pekerja dan Skema Kredit Investasi bagi pemilik usaha industri padat karya, akan sangat membantu baik pekerja

industri untuk melakukan transisi. Proses transisi ini juga perlu didampingi oleh berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kerja sama antar-pemangku kepentingan sangat diharapkan dalam mengawal proses transisi industri ini.

Hal terpenting dalam usaha peningkatan resiliensi industri padat karya, adalah kolaborasi antar-kementerian/lembaga untuk dapat melakukan harmonisasi peraturan teknis terkait dengan industri padat karya. Misalnya, kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian, sangat perlu dilakukan untuk menjaga industri dalam negeri. Contoh lain, kolaborasi antara Kementerian Tenaga Kerja, Serikat Buruh, dan Kementerian Perindustrian untuk mencari titik tengah mengenai nilai upah minimum regional, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak memberatkan pelaku industri, tetapi masih memberikan pendapatan yang cukup bagi para pekerja. Kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian juga diperlukan untuk mengatur hal-hal terkait insentif dan stimulus industri secara fiskal.

Penutup

Peningkatan resiliensi industri padat karya sangat penting untuk dilakukan, mengingat penyerapan tenaga kerja saat ini masih bertumpu pada industri padat karya. Hal terpenting dalam usaha peningkatan resiliensi industri padat karya adalah kolaborasi antar-kementerian/lembaga dalam melakukan harmonisasi peraturan teknis terkait industri padat karya. Kolaborasi ini diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan seperti upah minimum yang rendah, tenaga kerja yang kurang terampil, dan perlindungan bagi pekerja atau pelaku industri.

Komisi VII DPR RI dalam fungsi pengawasan perlu mendorong kerja sama antar-kementerian/lembaga yang terkait dengan industri padat karya, agar kebijakan teknis yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran. Di samping itu juga mendorong pemerintah untuk menciptakan strategi meningkatkan kemampuan SDM dan keterampilan pekerja dalam industri padat karya. Komisi VII DPR RI melalui fungsi legislasinya juga perlu mendorong revisi UU Perindustrian yang dapat memberikan perlindungan, baik terhadap pekerja maupun pelaku industri dalam negeri.

Referensi

- Indonesia's manufacturing PMI returns to expansion level as production rises. (2025, January 2). *Business Indonesia*. <https://business-indonesia.org/news/indonesia-s-manufacturing-pmi-returns-to-expansion-level-as-production-rises>
- Bolivia. (2024, November 5). Atasi deflasi, ekonom UGM minta pemerintah dongkrak daya beli masyarakat. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/atasi-deflasi-ekonom-ugm-minta-pemerintah-dongkrak-daya-beli-masyarakat/>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [Kementerian ESDM]. (2025, Februari 14). Harga minyak dunia naik, ICP Januari 2025 dipatok USD76,81 perbarell. *Kementerian ESDM*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/harga-minyak-dunia-naik-icp-januari-2025-dipatok-usd7681-perbarell>
- Lestari, E. P. (2017). Analisis kinerja industri manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, 183. <https://doi.org/10.17970/jrem.17.170115.ID>
- Limanseto, H. (2024, Desember 24). Pemerintah siapkan Rp20 triliun untuk kredit investasi padat karya [Siaran pers]. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6115/pemerintah-siapkan-rp20-triliun-untuk-kredit-investasi-padat-karya>
- Pangestu, R. A. (2024, Oktober 8). Pengaruh tarif dan bea cukai pada ekspor dan impor. *Mitra Pradhana Consultindo*. <https://www.mitraconsultindo.co.id/pengaruh-tarif-dan-bea-cukai-pada-ekspor-dan-impor/>
- Wuryandari, D., & Zanggi, M. Z. E. (2024). Penurunan purchasing manager's index. *Isu Sepekan Komisi VII*. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--I-PUSLIT-September-2024-206.pdf

